

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semakin meningkatnya kriminalitas di Indonesia berakibat timbulnya berbagai macam modus operandi dalam terjadinya tindak pidana. Disamping itu, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum pidana menyebabkan seorang menjadi korban perbuatan pidana atau seorang pelaku pidana. Salah satu bentuk tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat adalah tindak pidana pencabulan.

Tindak pidana pencabulan itu terus berkembang hingga sekarang, dapat dikatakan tidak ada perubahan yang berarti meski struktur dan budaya masyarakat berkembang menuju kearah modern. Masalah kejahatan merupakan bagian dari perubahan sosial dan bukan hal yang baru, pada prinsipnya meskipun tempat dan waktunya berlainan namun tetap dinilai sama. Peningkatan kejahatan dari waktu ke waktu tidak dapat dihindari, dikarenakan bentuk perubahan sosial sebagai pendorongnya. Tindak pidana pencabulan ini tidak hanya terjadi dikota-kota besar, bahkan terjadi di desa-desa terpencil.

Tindak pidana pencabulan di atur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) pada bab XIV Buku ke- II yakni dimulai dari Pasal 289-296 KUHP, yang selanjutnya dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. Tindak pidana pencabulan tidak hanya di atur dalam KUHP saja namun di atur pula pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam kasus ini tersangka AP dituduhkan telah melakukan tindak pidana “melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain” sebagaimana diatur dalam pasal 81 (1) ke 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.¹

Kronologi kejadian terjadi sekitar tahun 2010 dimana saat itu Tersangka AP merupakan tetangga dari Korban LA yang masih duduk dibangku SMP dan masih dibawah umur. Pada tahun 2012 tersangka AP dilaporkan ke pihak kepolisian oleh keluarga Korban LA. Dalam pengakuannya Korban LA telah disetubuhi oleh Tersangka AP dari tahun 2010 hingga sampai dengan tahun 2012 dan pada saat itu keduanya masih sebagai tetangga bersebelahan rumah.² Namun pada awal tahun 2012 Korban LA dan keluarganya pindah rumah dan pada saat itu sudah tidak lagi bertemu dengan Tersangka AP.

Pada hari senin dan tanggal lupa, bulan Desember tahun 2010, sekira pukul 13.00 WIB. Di dalam kamar rumah korban di Jl. Dr Wahidin RT004 RW003 Kel. Kebomas Kec. Kebomas Kab. Gresik, telah terjadi tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan dan atau memaksa dan atau melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya, yang dilakukan oleh tersangka Agus Prasetyo Budi terhadap korban Lely Agustina, yang mana kejadian itu dilakukan berulang-ulang hingga tidak ingat sampai berapa kali dan yang terakhir dilakukan padahari dan tanggal lupa, bulan April tahun 2012, sekitar pukul 15.00 WIB dikamar tidur rumah tersangka di Jl. Dr Wahidin RT004 RW003 Kel. Kebomas Kec. Kebomas Kab. Gresik. Berawal dari sewaktu

¹ Putusan Pengadilan Negeri Gresik No.259/Pid.B/2012/PN.GS

² Keterangan saksi LA sekaligus korban dalam Berita Acara Pemeriksaan

korban datang bermain dirumah budhenya dan selanjutnya bilang pada budhenya ingin membeli jamu dirumah ibu tersangka, setelah itu korban datang kerumah tersangka bermaksud ingin membeli jamu pada ibu tersangka yang jualan jamu dirumahnya, ketika korban memanggil ibu tersangka yang pada waktu itu tidak ada namun oleh tersangka dibilang ibunya ada didalam rumah bagian belakang dan korban disuruh masuk kedalam rumah , setelah korban masuk kedalam rumah dan ternyata ibu tersangka tidak ada didalam rumah korban hendak langsung kembali keluar rumah akan tetapi tiba-tiba tangan korban ditarik oleh tersangka lalu korban didekap/dirangkul lalu dibawa masuk kedalam kamar tidur tersangka yang kemudian didalam kamar tidur tersebut korban disetubuhi dengan cara dipaksa tubuh korban direbahkan diatas tempat tidur lalu rok yang dikenakan korban disikap keatas dan celana dalam korban dibuka/dilepas, setelah itu tersangka membuka celana dan celana dalamnya sendiri dan dalam kondisi penisnya tegang berusaha dimasukkan kedalam vagina korban, setelah berhasil masuk lalu digerakkan naik turun selama kurang lebih sekitar 5 (lima) menit dan begitu tersangka terasa mau mengeluarkan sperma penisnya dicabut dan mengeluarkan sperma diluar, bersamaan dengan itu ada suara budhe korban memanggil nama korban sehingga dengan bergegas korban langsung membetulkan pakaiannya lalu kembali pulang menuju rumah budhenya.

Akibat dari kejadian tersebut alat kelamin korban terdapat robekan lama pada selaput darah jam 06.00 dan 10.00. kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan benda tumpul, sesuai dengan hasil visum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik, dengan Nomor: 353/388/437.76/2012.³

³ Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Agus Prasetyo Budi di Polres Gresik

Dalam keterangan yang sebenarnya dari Tersangka AP bahwa mereka sudah lama tidak berhubungan dan tidak bertemu satu sama lain , sebelumnya juga Korban LA tidak pulang kerumahnya selama 2 hari dan setelah ditanya oleh keluarganya Korban LA mengaku pergi bersama tersangka AP. Pada akhirnya Tersangka AP dilaporkan kepihak kepolisian dan ditangkap pada tanggal 15 Mei 2012. Namun didalam kasus ini yang menjadi sorotan ialah pada proses pemeriksaan dan penahanan tersangka AP, dimana pada saat proses pembuatan BAP (berita acara pemeriksaan) tersangka dibawah tekanan dan mendapat kekerasan dari pihak penyidik dan diminta untuk mengakui semua yang sudah ditulis dalam BAP guna untuk memudahkan dan mempercepat proses penyidikan tersangka AP. Selama proses penyidikan tersangka dilarang untuk menghubungi pihak keluarga sampai proses BAP selesai dan kasusnya diproses. Setelah proses BAP selesai dan kasus mulai diproses, tersangka AP dimasukkan sel tahanan Polres Gresik selama 2 hari dan baru diperbolehkan menghubungi pihak keluarga.⁴

Pada dasarnya disini kedudukan tersangka dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah sebagai subjek, yang artinya tersangka tidak dapat dipaksa untuk mengaku bersalah dengan cara paksaan, tekanan ataupun ancaman-ancaman dan dalam setiap pemeriksaan harus diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat, martabat dan harga diri tersangka tidak terlihat sebagai obyek . yang intinya menyatakan bahwa tujuan pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik tidak untuk mendapatkan pengakuan tersangka tetapi untuk mendapatkan keterangan tersangka mengenai peristiwa pidana yang dipersangkakan kepadanya.

⁴ Wawancara dengan Tersangka Agus Prasetyo Budi tanggal 3 juni 2017

Seorang tersangka tidak dapat diperlakukan dengan sekehendak hati pemeriksa dengan alasan bahwa dia telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, Karena sebagaimana asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) yang dianut dalam di dalam proses peradilan pidana di Indonesia yang tercantum dalam pasal 8 UU No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yaitu “setiap orang yang diditahan, disangka, ditangkap, dituntut, dan/ atau dihadapkan didepan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.”⁵

Pada tahun 2015 sampai tahun 2017 ini ada sekitar 50-60 kasus pencabulan yang tengah ditangani oleh Polres Gresik. Dari 10 orang tersangka pencabulan 4 orang diantaranya adalah anak-anak yang masih dibawah umur dan selebihnya adalah orang dewasa.⁶ Dalam masalah ini terdapat fakta-fakta yang juga menyatakan bahwa pada kenyataannya hak-hak tersangka khususnya pada tindak pidana pencabulan masih banyak yang dilanggar oleh pihak penyidik.

Seperti halnya pada kasus pencabulan dengan tersangka Agus Prasetyo yang dimana dalam kasus ini pada tahap pemeriksaan dan proses pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka Agus Prasetyo mendapatkan kekerasan dan tekanan dari pihak penyidik tentu saja ini sudah melanggar hak-hak dari tersangka dalam tahap pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan dan tersangka atau terdakwa berhak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim sesuai dengan isi dari pasal 52 KUHAP. Bukan

⁵Hak-hak tersangka dan terdakwa secara umum dalam KUHAP, dalam <http://www.negarahukum.com>, [diakses 21 april 2017]

⁶ Wawancara dengan Ibu Rahma Kartika Putri,SH selaku penyidik pembantu satreskrim unit PPA di Polres Gresik, tanggal 3 juli 2017

hanya itu saja disini hak tersangka Agus Prasetyo pada saat dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan kepada keluarga atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya sesuai dengan pasal 59 KUHAP, namun pada kenyataannya setelah 2 hari dilakukan penahanan tersangka Agus Prasetyo baru diperbolehkan menghubungi pihak keluarga. Hal tersebut sesuai dari pengakuan tersangka Agus Prasetyo yang merasa tidak mendapatkan haknya sebagai tersangka yang dilindungi hak-haknya oleh negara.

KUHAP atau Kitab Undag-Undang Hukum Acara Pidana merupakan landasan operasional yang mengatur mengenai prosedur beracara dalam bidanag hukum pidana didalamnya sangat memperhatikan hak asasi seseorang yang tersangkut tindak pidana disetiap tingkat peradilan, penjatuhan hukuman sampai pelaksanaan putusan. Selanjutnya melihat dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 52 menyatakan bahwa dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim. Pasal 59 menyatakan “Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya.

Melihat Pasal diatas, kita tahu bahwa tersangka AP berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik sesuai dengan pasal 52 KUHAP. Namun pada kenyataannya tersangka diminta untuk mengakui semua yang ada di BAP yang pada dasarnya semuanya belum tentu benar dilakukan oleh tersangka AP.

Dalam praktek, ada beberapa masalah terjadi. Misalnya tersangka AP dilarang untuk menghubungi pihak keluarga atau orang lain guna untuk memberitahukan tentang penahanan dalam proses peradilan sesuai dengan pasal 59 KUHAP.

Berdasarkan uraian tersebut diatas terjadi pelanggaran hak-hak tersangka yang dilakukan oleh pihak penyidik di Polres Gresik. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dengan mengangkat judul “**Pelaksanaan Hak-Hak Tersangka Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Penyelidikan Dan Penyidikan (Studi Penerapan Pasal 52 Dan 59 KUHAP dalam Kasus Tersangka Agus Prasetyo Di Polres Gresik).**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan hak-hak tersangka pada proses penyidikan tindak pidana pencabulan dalam kasus tersangka Agus Prasetyo Budi ?
2. Bagaimana akibat hukum dari hasil pemeriksaan penyidik yang melanggar hak-hak dari tersangka ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka terdapat beberapa tujuan yang melandasi penulisan ini, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan hak-hak tersangka pada proses penyidikan tindak pidana pencabulan dalam kasus tersangka Agus Prasetyo Budi.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari hasil pemeriksaan penyidik yang melanggar hak-hak dari tersangka.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat berguna sebagai sarana penambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang permasalahan yang diteliti oleh penulis, sekaligus sebagai syarat untuk penulisan Tugas Akhir dan menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

E. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana masyarakat untuk memperoleh pandangan dan pengetahuan terkait dengan proses penyidikan dan penahanan tersangka pada tindak pidana pencabulan.

2. Bagi Kalangan Praktisi Hukum

Penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wacana bagi kalangan praktisi hukum berkaitan dengan proses penyidikan dan penahanan tersangka pada tindak pidana pencabulan.

3. Bagi Kalangan Akademisi

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi atau rujukan awal untuk penelitian lebih lanjut berkaitan dengan proses penyidikan dan penahanan tersangka pada tindak pidana pencabulan.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yakni melihat hukum sebagai perilaku manusia dalam masyarakat.⁷ Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis mengenai proses penyelidikan dan penyidikan tersangka pada tindak pidana pencabulan.

1. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi di Polres Gresik yang beralamat di Jl. Basuki Rachmad No. 22 Gresik – Jawa Timur. Alasan penulis memilih lokasi penelitian disini ialah dikarenakan penulis menemukan adanya pelanggaran hak-hak tersangka Agus Prasetyo Budi pada saat proses pemeriksaan tahap penyelidikan dan penyidikan oleh para penyidik di Polres Gresik dalam perkara Tindak Pidana Pencabulan sesuai dengan nomor perkara No.259/Pid.B/2012.

2. Jenis Data

Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan beberapa bahan hukum sebagai berikut :

a. Jenis data primer

Jenis data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber –sumber asli atau langsung tanpa adanya perantara, dapat juga diperoleh melalui membaca

⁷ Fakultas Hukum. 2012. *Pedoman Penulisan Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Hal 18

BAP (berita acara pemeriksaan) dari tersangka Agus Prasetyo Budi dan wawancara langsung dengan pihak penyidik di Polres Gresik.

b. Jenis data sekunder

Jenis data sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan buku-buku yang digunakan dengan mengkaitkan beberapa bahan literatur yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No.4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan seperti KUHAP, studi dokumentasi melalui dokumen atau arsip-arsip dari pihak yang terkait dengan cara mencatat atau meringkas dokumen-dokumen, serta penelusuran situs-situs internet yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Yaitu memperoleh dan mengumpulkan data melalui tanya jawab, dialog/diskusi dengan pihak terkait yaitu tersangka Agus Prasetyo Budi dan Bripka Slamet Mujiono,SH selaku Penyidik PPA dan Ibu Rahma Kartika Putri,SH selaku penyidik pembantu Satreskrim di Polres Gresik yang dianggap mengetahui banyak mengenai permasalahan dalam penelitian yakni mengenai proses penyelidikan dan penyidikan tersangka pada tindak pidana pencabulan.

b. Dokumentasi

Studi dengan penelusuran/pencatatan dengan mengumpulkan data-data atau arsip yang ada di Polres Gresik dan mempelajari data dari dokumen-dokumen yang berupa catatan-catatan yang berkaitan dengan penelitian hukum ini guna membahas permasalahan yang ada.

c. Studi Kepustakaan

Studi dengan menjadikan buku-buku, literatur-literatur, maupun berita yang ada baik berupa surat kabar maupun internet yang berhubungan dengan masalah yang di bahas untuk mendukung landasan teori.

4. Teknik Analisa Data

Dari hasil penelitian yang sudah terkumpul seperti yang diperoleh dari lapangan dan data kepustakaan, selanjutnya penulis menganalisa data tersebut secara deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat [deskriptif](#) dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan [teori](#) dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan [fakta](#) di lapangan.

Analisis data kualitatif sebagai cara penjabaran data berdasarkan hasil temuan di lapangan dan studi kepustakaan, kemudian disusun dan dilakukan reduksi dan pengolahan data sehingga menghasilkan suatu sajian data yang kemudian dari data tersebut ditarik suatu kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri dari 4 bab yang tersusun secara sistematis sehingga dapat dengan mudah dipahami, yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang yang memuat alasan atau faktor pendorong untuk dilakukannya suatu penelitian berdasarkan permasalahan yang ada, rumusan masalah, tujuan penelitian tersebut, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan tentang teori-teori yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun literatur yang lainnya berkaitan dengan permasalahan tentang penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

BAB III : PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan pembahasan mengenai permasalahan yang diangkat oleh penulis.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang perlu disampaikan terkait dengan permasalahan yang telah diteliti serta saran bagi peneliti selanjutnya.